

## **PERDAGANGAN DAN POLITIK DI KESULTANAN TERNATE PADA ERA PEMERINTAHAN BELANDA**

Rustam Hasim<sup>1</sup>, Jainudin Abdullah<sup>2</sup>, Syahril Muhammad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi PPKn, FKIP. Universitas Khairun

rustamhasyim@gmail.com<sup>1</sup>, jainudinabdullah76@yahoo.com<sup>2</sup>, syahrilmuh2022@gmail.com<sup>3</sup>

### **Abstract**

Ternate comes to the fore in historical records mainly because of its spice products. This situation is supported by its geographical position which is located in the unity of the Maluku Sea, Sulawesi, and the Sulu Sea which is a single unit. The main factor of north Maluku's appeal to traders between nations is spices, so the North Maluku area is given the nickname *The Spice Islands*. The historical side was important in the north Moluccas when the Dutch were present in the early 17th century. At the same time, the Dutch managed to establish counter-ports in Ternate and Ambon by incorporating themselves in its rivalry with the Portuguese and Spanish and also from the point of view of Ternate in its rivalry with the sultanate of Tidore. The main objective of the Dutch alliance was to control the spice trade which eventually caused them to conflict with the North Moluccan rulers. The North Moluccas region in the 18th century was divided into three kingdoms: Ternate, Tidore, and Bacan, which had formal and written relations with the VOC/Dutch Government regarding the security of Monopoli spices.

**Keywords:** Sultanate of Ternate, Government of the Netherlands, Economy and Politics

### **PENDAHULUAN**

Keterlibatan Ternate dalam perdagangan internasional sudah lama bahkan sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Informasi awal mengenai perdagangan cengkeh disebut dalam ekspedisi Ibnu Batutah, Tome Pires dan Antonio Galvao menyebut Kepulauan Maluku (Ternate, Tidore, Moti, Makian) sebagai penghasil cengkeh yang di butuhkan dalam perdagangan. Para pedagang Cina, Timur Tengah dan Melayu telah lebih dahulu berdatangan ke Maluku untuk melakukan perdagangan pada abad ke-14. Bahkan menurut sumber sejarah Cina (catatan dari Wang Ta Yuan) dan sumber berita pelayaran (Shun Feng Shiang) yang dikutip oleh Anthony Reid bahwa hubungan perdagangan langsung antara Cina dan Maluku terjalin sebelum

masehi melalui pelayaran bagian timur disebutkan berturut-turut dari Ch'uan-chou kekepulauan Pascadores lalu menyusuri pesisir Taiwan, Luzon (Lusung) dan Lubang. (Lu-peng), ke Nindore (ma-li-lu). Sebelah selatan dari Mondoro ada jalan lintas menuju ke Mindanao. Dari sinilah jalur pelayaran menuju Maluku (Mei-lo-chu). Bahkan istilah *cengkeh* berasal dari bahasa Cina yang berarti paku, dalam bahasa Mandarin adalah *zhi jia*, dan dalam bahasa Minnan adalah *zhen ga*. Jaringan emporium tersebut dinamakan "jalur rempah-rempah" (*spice route*). Penggunaan cengkeh oleh orang Cina membuktikan bahwa kepulauan Maluku (Ternate) telah dikenal oleh Cina sebelum kedatangan bangsa-bangsa Arab dan Eropa lainnya.

Berdasarkan pemberitaan tersebut daerah Maluku (termasuk

Ternate) telah menjadi salah satu pusat perhatian bagi perdagangan internasional di jalur pelayaran dan perdagangan Indonesia bagian timur. Menurut Leirissa, perdagangan di Ternate tidak dapat ditempatkan secara terpisah dari sejarah perdagangan di wilayah kepulauan Indonesia pada khususnya, Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah dan Eropa pada umumnya. Tidak dapat di sangkal lagi Ternate merupakan pangkalan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan antar bangsa pada abad ke-14. Jalur pelayaran dan perdagangan ini terbentang dari Indonesia bagian barat melalui Selat Malaka terus ke pesisir utara Jawa terutama Jawa Timur terus ke Banda dan Ternate. Faktor utama daya tarik Maluku (Ternate) bagi para pedagang antar bangsa itu ialah rempah-rempah, sehingga daerah Maluku oleh orang barat di beri julukan *The Spice Islands* (kepulauan rempah-rempah).

Peranan Ternate sebagai pusat perdagangan, hal ini didukung oleh sumberdaya alam (rempah-rempah) yang melimpah. Pada abad ke 15 Ternate muncul sebagai pusat rempah-rempah sekaligus pimpinan aliansi kerajaan-kerajaan *Moloku Kie Raha* (Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo). Sebagai pusat perdagangan, Ternate mengalami kejayaan memasuki abad ke-16 Pada masa itu Ternate berhasil meluaskan kekuasaannya yang terbentang antara Sulawesi dan Papua. Ke barat Ternate mengadakan ekspansi ke pesisir timur Sulawesi, termasuk Kepulauan Sula, Banggai dan sebagainya Buton. Ke Selatan wilayah kekuasaannya ke Seram Barat (jazirah Hoamoal) dan Kepulauan Ambon. Jaringan pelayaran perdagangan antara Ternate dengan para pedagang di nusantara menjadikan pelabuhan Ternate

tempat mengeksplor rempah-rempah dari daerah Maluku.

Sebagai daerah penghasil cengkeh (*eugenia aromatica*) di Kepulauan Maluku. Menurut Tome Pires, cengkeh hanya dihasilkan terutama di pulau; Ternate, Tidore, Moti, Makian, Bacan dan sedikit Halmahera (Jailolo). Pulau-pulau ini menghasilkan sekitar 6.000 bahan cengkeh setahun bahkan lebih dari itu. Sementara pala (*myristica fragrans*) terdapat di Halmahera Timur (Maba, Patani, Weda) dan Kepulauan Banda. Tanaman cengkeh yang mempunyai banyak kegunaan antara lain sebagai bumbu penyedap masakan, untuk pengobatan, stimulasi selera makan, sebagai parfum dan bubuk cengkeh dipakai sebagai obat hirup yang biasanya merupakan asesori kalangan menengah keatas, bahkan mereka percaya bahwa cengkih dapat meningkatkan kemampuan seksual manusia. Manfaat inilah mendorong para pedagang dari berbagai negara atau dari penjuru dunia berdatangan ke wilayah ini untuk menukar hasil produksi mereka dengan rempah-rempah.

Ternate sebagai pusat rempah-rempah telah menjadi incaran negara-negara Eropa. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa terutama Portugis dan Spanyol pada abad 16 berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah tersebut. Orang Belanda yang pertama kali tiba di Ternate adalah Kapten Wijbrant van warwijk pada 22 Mei 1599 di terima dengan baik oleh Sultan Ternate ke-27 Said Barakati (1584-1606). Kedatangan Kapten Warwijk, titik awal hubungan ekonomi antara Belanda dengan Kesultanan Ternate. Belajar dari pengalaman hubungan antara Portugis dan Ternate yang menyebabkan terusnya Portugis dari daerah Maluku. Belanda

sangat berhati-hati dalam hal agama dan politik (pemerintahan). Belanda tidak mau terlibat dan berperan aktif dalam penyebaran agama Kristen maupun campur tangannya dalam bidang pemerintahan. Di bidang ekonomi dalam rangka memonopoli perdagangan cengkeh di Maluku, orang Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Ternate ke-28 Mudaffar (1606-1628) pada tahun 1607 di Benteng Melayu Fort Oranye. Isi perjanjiannya antara lain sebagai berikut: (1). Belanda di perbolehkan mendirikan benteng di Ternate, (2). Belanda membantu dan melindungi dari kemungkinan ancaman Spanyol. (3). Ongkos pemeliharaan tentara ditanggung oleh Ternate, (4). Belanda memperoleh monopoli rempah-rempah, (5). Saling hormat menghormati agama masing-masing, (6). Tanpa persetujuan kedua belah pihak tidak mengadakan perjanjian dengan Spanyol di Tidore.

Perkembangan perdagangan mengalami peningkatan ketika memasuki abad ke-17. Dengan melalui kongsi dagangnya VOC, Belanda berusaha menguasai jalur pelayaran dan perdagangan untuk menegakkan monopolinya, maka pengawasan produksi di perketat. Untuk memperkuat dan memperbesar kekuasaan Belanda, maka pada tahun 1609 VOC memperbaharui perjanjian dengan Kesultanan Ternate. Isi perjanjian yaitu; (1). VOC memperoleh produksi rempah-rempah yaitu rempah-rempah di jual kepada VOC. (2). Barang-barang import maupun ekspor di pegang langsung VOC. (3). Hanya kapal-kapal VOC yang boleh mengangkut barang-barang import maupun ekspor.

Sementara dalam bidang politik sejak pertama kali di Ternate 1599, mereka berusaha mengukuhkan kekuasaannya melalui perjanjian politik

dengan para sultan Ternate. Misalnya pada tanggal 26 Juni 1607 perjanjian antara Cornelis Matelief de Jonge dengan Sultan Mudafar menetapkan bahwa Belanda bertindak sebagai pelindung Ternate terhadap Spanyol. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sultan Ternate ke-29 Mandarsyah dengan Gubernur Jendral Karel Reinierszoon pada 31 Januari 1683 melepaskan Ambon untuk VOC. Begitu pula dilakukan oleh Sultan Sibori Amsterdam (Sultan Ternate ke-30). Pada 7 Juli 1683, melakukan perjanjian dengan Gubernur Jenderal (1). Hak Gubernur VOC untuk duduk dalam Dewan Kerajaan Ternate, (2). Semua eksekusi hukuman mati harus dengan persetujuan VOC, (3). Setiap pergantian sultan harus dengan persetujuan VOC. Dengan adanya persetujuan tersebut, Kesultanan Ternate kehilangan keadaulatan sebagai sebuah kerajaan yang merdeka. Dengan demikian, status de jure kesultanan ini tidak lebih dari sebuah kerajaan vazal dari VOC.

Meskipun VOC makin kokoh kekuasaannya terhadap Ternate, mereka masih tetap mengakui dan menghormati hak sultan atas daerah kekuasaannya yang meliputi; Pulau Ternate, sebagian Pulau Halmahera, Kepulauan Sula, Kepulauan Bangai dan Tobungku di pantai Timur Sulawesi Tengah. Sementara daerah kekuasaan Belanda hanya terbatas pada sebagian Pulau Ternate antara Benteng Orange dan Benteng Kastela.

Sekalipun VOC berhasil menancapkan monopoli atas perdagangan rempah-rempah di Maluku, ternyata keuntungan yang mereka peroleh dari komoditas ini justru semakin merosot. Menurut Ricklefs, ada dua hal yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, tidak terlampau mudahnya menarik keuntungan dari rempah-rempah karena Belanda selalu

menghadapi kesulitan dalam hal penawaran dan permintaan serta penetapan harga. *Kedua*, arti penting rempah-rempah kian merosot pada abad ke-17 dan ke-18. Untuk bisa tetap memegang kendali monopoli dan mengendalikan harga cengkeh di tingkat internasional, VOC merasa perlu mengadakan *extirpatie* secara ketat dan sistematis. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pembatasan produksi cengkeh (hanya di batasi di Ambon dan Banda), kelebihan produksi cengkeh harus dicegah dengan cara merusak tanaman yang lain dimana saja. Sistem eksploitasi komoditi dengan cara paksa tersebut, secara tidak langsung mengubah wajah Maluku dan sekitarnya dari yang semula sebagai pengekspor rempah-rempah menjadi daerah penyerahan wajib rempah-rempah. Konsekwensi VOC telah memporakporandakan para pedagang perantara yang pernah ada sebelumnya, sehingga menyebabkan tergusurnya peranan pedagang Cina, India dan Arab. Begitu pula para pedagang lokal, Melayu, Jawa, Makasar dan Buton tidak lagi menjadi kekuatan ekonomi pada saat itu. Berpijak dari realitas tersebut diatas, tulisan ini ingin jawab pertanyaan bagaimana perdagangan dan politik di Kesultanan Ternate pada era pemerintahan Belanda.

#### ***Arti Pentingnya Cengkeh bagi Bangsa Belanda***

“Pedagang Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk bunga pala (*Fuli*) dan Maluku untuk cengkeh, dan barang-barang dagangan ini tidak dikenal di tempat lain di dunia kecuali di tempat itu (Tomie Pires, dikutip dalam Anthoni Reid)”

Maluku Utara muncul dipanggung sejarah terutama karena rempah-rempahnya, keterlibatan Maluku Utara dalam perdagangan sudah lama bahkan sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Menurut A.B. Lapien Informasi awal mengenai perdagangan cengkih di sebut dalam ekspedisi Ibnu Batutah, Tome Pires dan Antonio Galvao yang menyebut Maluku Utara (Ternate, Tidore, Bacan, Moti dan Makian) sebagai penghasil cengkeh dan pala yang di butuhkan dalam perdagangan. Hal senada juga di kemukakan oleh Leirissa, perdagangan di Maluku Utara tidak dapat di tempatkan secara terpisah dari sejarah perdagangan di wilayah Kepulauan Indonesia pada khususnya, Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah dan Eropa pada umumnya. Faktor utama daya tarik Maluku Utara bagi para pedagang antar bangsa itu ialah rempah-rempah, sehingga daerah Maluku Utara oleh orang barat di beri julukan *The Spice Route* (jalur rempah-rempah).

Pada abad 16, Ternate telah menjadi pusat perhatian para pedagang internasional di jalur pelayaraan dan perdagangan Indonesia Bagian Timur. Daya tarik utama Maluku, termasuk Ternate, bagi pedagang antar-bangsa itu adalah rempah-rempah (cengkeh dan pala). Bangsa-bangsa Barat bahkan menjuluki Maluku sebagai *The Spice Island* (kepulauan rempah-rempah). Pada waktu itu, negara-negara Eropa (Portugis, Spanyol, dan Belanda) telah mengetahui nilai ekonomis dari tanaman cengkeh, sehingga mendorong mereka melakukan ekspansi untuk menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah di Maluku.

Tahun 1599 merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah Ternate. Pada tahun itu, Sultan Said Barakati (1584-1610) menjalin hubungan dagang dengan bangsa Belanda yang dipimpin

Kapten Wijbrant van Warwijk ketika mengunjungi Ternate. Dalam kunjungan tersebut, Sultan Said Barakati meminta agar Belanda meninggalkan tenaga kerja untuk menimbun cengkeh yang sewaktu-waktu dapat diambil jika ke Ternate. Sultan Said juga mengajak Belanda memerangi pedagang asing, khususnya Spanyol dan Portugis.

Selama berada di Ternate, Belanda memanfaatkan situasi memburuknya hubungan antara Ternate dan Tidore. Kedua wilayah itu sedang bersitegang akibat persaingan menegakkan dominasi. Situasi ini diperparah dengan keterlibatan orang-orang Belanda dan Spanyol. Belanda mendukung Ternate dan Spanyol membantu Tidore. Dukungan Belanda itu berujung imbalan berupa konsesi yang terkait dua hal. *Pertama*, monopoli dalam pembelian rempah-rempah dan penyediaan lahan. *Kedua*, izin untuk tinggal permanen dalam bentuk fasilitas pembangunan benteng atau loji. Periode tersebut menjadi babak baru bagi Ternate dalam kekuasaan Belanda.

Setelah memperoleh izin pembelian rempah-rempah dan mendirikan benteng di Pulau Ternate, tetapi pelaksanaan pemerintahan secara resmi baru dimulai setelah terbentuknya *Landvoogdij der Moluksche Eilanden* dengan diangkatnya gubernur pertama, Paulus van Carden, tahun 1610. VOC kemudian fokus untuk memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah. Untuk mempertahankan monopoli perdagangan cengkeh di Ternate, VOC membuat perjanjian kerja-sama dengan Sultan Mudafar (1610-1627) yang isinya sebagai berikut:

1. VOC memperoleh monopoli produksi rempah-rempah, yaitu rempah-rempah dijual kepada VOC.

2. Barang-barang impor maupun ekspor dipegang langsung oleh VOC.
3. Hanya kapal-kapal VOC yang boleh mengangkut barang-barang import maupun ekspor.

Sejak memonopoli produksi dan perdagangan rempah-rempah di wilayah Kesultanan Ternate, VOC mulai bersahabat, berkerjasama, dan bersedia memberi bantuan, baik keuangan maupun militer kepada Kesultanan Ternate. Sikap sultan dan bangsawan Ternate yang kooperatif tersebut bersedia kehilangan pendapatan dari perdagangan rempah-rempah di wilayah mereka membuat VOC memberikan uang imbalan yang disebut *recognitiepenneingen* ke sultan dan para bangsawan. Dengan pembayaran subsidi atau tunjangan tahunan tersebut, para sultan tidak diizinkan lagi melakukan perniagaan rempah-rempah.

Apa yang dilakukan sultan ke-28 itu, dalam membangun kerja-sama ekonomi dan politik dengan VOC, ternyata dalam perkembangannya diikuti pula oleh sultan-sultan berikutnya. Seperti Sultan Mandarsah (1628-1648) yang membuat perjanjian dengan Gubernur Jenderal Karel Reineerszoon tanggal 31 Januari 1652. Perjanjian itu menyebutkan bahwa Kesultanan Ternate sepakat melepaskan daerah Ambon untuk VOC. Lalu Sultan Muhammad Nurul Islam (1675-1691) juga melakukan perjanjian dengan VOC pada tahun 1683. Sultan Muhammad Nurul yang secara formal memegang kekuasaan atas Seram Barat, termasuk Luhu, Kambelo, Lusidi, Hitu, dan Maluku Selatan setuju menyerahkan kekuasaan atas daerah tersebut ke VOC.

Dalam perkembangannya pada tahun 1854 pemerintah Belanda menjadikan Ternate sebagai pelabuhan bebas. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh (meniru) kebijakan Inggris

dalam menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas (1819) yang mempengaruhi arus perdagangan sepanjang Asia (Cina, Hongkong, Singapura) dan kepulauan Hindia Belanda. Kebijakan pelabuhan bebas ini bertujuan untuk memikat dan memusatkan kegiatan perniagaan penduduk pribumi ke pelabuhan bebas yang berada dibawah pengawasan dan berharap dapat mencegah mereka menjalin hubungan niaga dengan bangsa Eropa lainnya. Tetapi pelaksanaannya pelabuhan bebas ini adalah pelabuhan bebas bersyarat, sebagaimana di kemukakan oleh oleh Leirissa bahwa setiap kapal yang berlabuh harus dikenai pajak dan berlayar harus mendapatkan surat izin pelayaran yang memuat tentang nama kapal, pemiliknya, muatannya, nahkondanya serta tujuan pelayaran.

Mengenai penerapan pelabuhan bebas, disini terdapat perbedaan antara pelabuhan bebas versi Inggris dan Belanda. Bagi Inggris pelabuhan bebas berarti pelabuhan yang bebas dari semua beban pajak perdagangan seperti; pajak impor, ekspor dan pelabuhan. Di samping tidak dibenarkan adanya pemberian hak-hak istimewa kepada pedagang dan pengusaha tertentu; larangan berniaga komoditi tertentu, formalitas yang menghambat dan menghidupkan keadaan persaingan bebas. Bagi pemerintah Hindia Belanda yang dimaksudkan dengan pelabuhan bebas adalah pelabuhan yang bebas yang disingahi oleh kapal-kapal bendera asing tetapi dengan syarat harus membayar pajak, atau pelabuhan bebas yang bersyarat.

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Edward L. Poelinggomang bahwa sejak Pemerintah Belanda menjadikan tujuh pelabuhan bebas di kawasan Timur Indonesia yakni; Makasar, Manado, Kaili, Kema, Banda, Ambon dan Ternate

dikenakan peraturan yang seragam di pelabuhan tersebut yakni; tarif pajak ekspor-impor pelabuhan, pengaturan komoditi perdagangan, menutup pelabuhan bagi kapal-kapal yang berbedera asing, membatasi aktivitas ekonomi penguasa pribumi, dan pembatasan perdagangan asing. Semua itu merupakan langkah perlindungan kepentingan ekonomi, sekaligus dimaksudkan menempatkan posisi Belanda untuk menguasai perdagangan di daerah dikoloninya.

Menurut I Gde parimatha kebijakan ini tidak terlepas dari pengaruh (meniru) kebijakan Inggris dalam menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas (1819) yang mempengaruhi arus perdagangan sepanjang Asia (Cina, Hongkong, Singapura) dan kepulauan Hindia Belanda. Tidak jauh berbeda dengan kesimpulan yang dikemukakan diatas, menurut Edward L. Poelinggomang bahwa, apa yang dilakukan Inggris menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas oleh pemerintah Belanda hal itu dipandang akan mengancam kedudukan politik dan ekonominya, Untuk mengantisipasi itu Pemerintah Hindia Belanda berusaha menjadikan Batavia sebagai pusat dari kegiatan ekonomi Nusantara atau sebagai alternatif dari Singapura. Di samping itu menjadikan beberapa kota pelabuhan dikawasan Indonesia Timur sebagai pelabuhan bebas, seperti Makasar (1847), Manado dan Kema (1848) Kaili, Banda, Ambon (1853) dan Ternate 1854.

Dengan adanya pelabuhan bebas ini dalam perkembangannya terjadi perubaban komoditi perdagangan. Pada periode ini cengkeh tidak lagi di perdagangan akibat kebijakan *externpassi* dan *hangitochten* yang dijalankan oleh VOC, dimana kebun cengkeh milik petani

ditebang atau dibakar guna menghindari menumpuk yang menyebabkan menurunnya komoditi *itu* di pasaran Eropa. Dan bergeser kepada komoditi hasil laut seperti; tripang, kerang mutiara, dan sirip penyu yang dipejual belikan para pedagang-pedagang Cina yang belum menarik minat para pedagang Eropa pada saat itu. Walaupun tidak signifikan dalam nilai maupun volume ekspor tapi sangat mewarnai aktivitas perdagangan dalam periode tersebut.

Memasuki dekade terakhir abad ke-XIX pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya dialami di Karesidenan Ternate pada khususnya, tetapi dalam skala makro pertumbuhan ekspor Indonesia mengalami kemajuan dengan diterapkannya liberalisasi ekonomi dan peningkatan perkapalan sehingga mendorong munculnya bahan-bahan baru untuk ekspor. Ada dua ciri khas dalam pertumbuhan itu, pertama, perekonomian Hindia Belanda yang mengutamakan sektor pertambangan hasil bumi dan laut Kedua, munculnya diversifikasi komoditas ekspor perkebunan yang disertai dengan meningkatnya hasil perkebunan rakyat.

Sebagaimana di kemukakan oleh J. Thomas Lindblad bahwa pertumbuhan ekonomi di luar Jawa mengalami kemajuan indeks ekspor yang sangat pesat, ini membuktikan adanya berbagai pola yang membawa pada kinerja ekspor berhasil diluar Jawa. Namun pertumbuhan ekonomi yang pesat itu tidak diimbangi dengan ekonomi yang optimal oleh pemerintahkolonial. Menurut Anne Booth. Booth bahwa sesudah tahun 1918, laju pertumbuhan ekspor meningkat di luar Jawa, tetapi tidak imbangi dengan pembangunan prasarana yang seimbang, sebagian besar di biarkan begitu saja pada waktu berakhimya kekuasaan Belanda. *Di*

samping itu, arus keuntungan yang dikirim keluar selama tiga dasawarsa terakhir dari pemerintahan kolonial amat besar dari keuntungan bersih perdagangan ditanah jajahan.

Sementara itu bagi Karesidenan Ternate dalam periode itu pemerintah Hindia Belanda dan para investor swasta membuka lahan perkebunan yang berorientasi ekspor seperti; di *Afdeling* Bacan dengan perkebunan damar (BAM), di *Afdeling* Tobelo dengan perkebunan kelapa (MKCM), dan di Ternate Selatan dengan perusahaan perkebunan pala (*Boddendijk*). Dalam periode yang sama sebanyak 15 hak guna usaha telah diberikan penguasa lokal di Karesidenan Ternate atas nama pemerintah Hindia Belanda. Dalam periode tersebut daerah ini tidak lagi bergantung pada rempah-rempah (cengkeh dan pala) dan munculnya berbagai komoditas baru, seperti kopra, damar, karet, tembakau, kopi, coklat dan sarang burung, serta hasil laut seperti mutiara, teripang, kerang, rumput laut dan sirip ikan hiu mulai menjadi andalan.

Hal itu mendorong tampil dan berperannya kelompok-kelompok pedagang tersebut di kawasan ini sebagaimana di kemukakan oleh H.W, Dick yang menyebutkan 5 suku bangsa bangsa yang memiliki peranan penting melakukan perdagangan antar pulau di Indonesia bagian timur yakini: Bugis, Makasar, Madar, Buton dan Madura. Pada umumnya mereka adalah pedagang perantara. Pedagang ini memiliki dua fungsi yaitu pedagang distribusi yang menjual dan menyebarkan barang-barang konsumsi masyarakat dan pedagang koleksi yang bertugas mengumpulkan hasil-hasil produksi pertanian kemudian dijual kepada konsumen. Sementara itu penduduk pribumi juga tertarik menjadi

pedagang karena didorong untuk memasarkan hasil- hasilnya.

### ***Hegemoni Politik***

Sementara pada bidang politik, setelah Hindia Belanda kembali mengambil-alih Indonesia dari tangan Inggris berdasarkan Konvensi London 1814, pemerintah Hindia Belanda melakukan perubahan struktur pemerintahan di Maluku. Jika sebelumnya Maluku sebagai *Landvoogdij der Moluksche Eilanden* terdiri dari Karesidenan Ternate dan Manado yang berkedudukan di Ternate, dihapus dan dibentuk *Gouvernement der Moluksche Eilanden* (Pemerintahan Kepulauan Maluku), yang terdiri dari Karesidenan Ternate, dan Banda berpusat di Ambon. Alasan pemindahan pemerintahan ini, agar Pemerintah Hindia Belanda dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku bagian selatan, sekaligus menguasai daerah-daerah koloni yang baru. Dalam rangka mengokohkan hegemoninya, pada tanggal 27 Mei 1824, Gubernur Jenderal Baron van der Capellen mengunjungi Ternate dan Tidore. Dalam kunjungan tersebut, disepakati beberapa perjanjian oleh Sultan Ternate Muhammad Zan dan Sultan Tidore Ahmadul Mansur dengan Gubernur Jenderal van der Capellen, sebagai berikut.

1. Pemerintah Hindia Belanda menjalin persahabatan dengan Kesultanan Ternate dan Tidore.
2. Kesultanan Ternate dan Tidore mengakui hak gubernemen atas beberapa daerah di sebarang lautan (Buru dan Seram Timur) dan berjanji membantu gubernemen bila terjadi perang serta kawula kesultannya tidak akan menjadi kawula atau rakyat kerajaan asing.
3. Kedua kesultanan tidak akan membuat perserikatan apapun dengan kekuasaan

lain tanpa seizin gubernemen dan segala perselisihan antara keduanya atau antara kawula kesultanan keduanya akan dilaporkan ke gubernemen.

4. Kedua kesultanan mengakui hak gubernemen menempatkan pegawainnya di daerah kekuasaannya atau mendirikan bangunan perkantoran atau perumahan yang akan dipilih sendiri oleh gubernemen.
5. Orang Eropa atau bangsa Eropa lainnya, orang Cina, Makassar, atau orang asing lain, berada di bawah kewenangan gubernemen. Pihak kesultanan tidak boleh memberikan izin tempat tinggal di wilayah kesultanan tanpa izin khusus dari gubernemen.
6. Pemilik perkebunan rempah-rempah wajib menjaga produk yang dihasilkannya dan hanya boleh dijual ke gubernemen. Para sultan mewajibkan para produsen rempah-rempah untuk memelihara pohon-pohon mereka sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Perjanjian tersebut membuat penguasa kedua kesultanan itu menjadi perpanjangan tangan dari Gubernur Belanda. Sejak saat itu, pengangkatan para sultan Ternate lebih didominasi kehendak dan pilihan Belanda. Sultan tidak lagi dipilih oleh *Bobato bobato nyagimoi setufkange* (dewan delapan belas) dan *Gam Raha* (legislatif). Hal ini sebagaimana di kemukakan Tobias: "Pergantian sultan terpergantung dari pilihan gubernemen dalam menetapkan syarat-syarat tertentu bagi calon sultan yang mana dalam hal ini tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dahulu dan terikat pada adat istiadat, akan tetapi pilihan itu tergantung dari banyak



sedikitnya kesanggupan keturunan raja yang dianggap layak.”

Pengangkatan seorang sultan harus mendapat pertimbangan residen dan harus memenuhi beberapa kriteria. *Pertama*, calon sultan seorang anak bangsawan yang mempunyai seorang ibu terhormat atau bangsawan pula. Calon sultan hendaknya seorang yang bijaksana, berani, dan tanpa cacat. *Kedua*, calon sultan yang diangkat sudah menunjukkan kesetiaan terhadap pemerintah Belanda dan mempunyai karakter terpuji. *Ketiga*, menandatangani pernyataan tertulis yang isinya mengakui serta tunduk kepada kekuasaan Belanda. *Keempat*, dipandang cakap dalam mengendalikan pemerintahan. Apabila sultan meninggal dunia, maka sultan yang dipilih oleh *bobato nyagimoi setufkange* (dewan delapan belas) dan *Gam Raha* harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari residen.

Untuk memantapkan kekerabatan dalam hubungan pemerintahan dengan para sultan Ternate, sultan diperlakukan sebagai anak wakil Pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini residen. Jadi sultan wajib menyebut bapak kepada residen Belanda dan kakek kepada Gubernur Belanda. Sejak itulah Belanda mempunyai pengaruh terhadap Kesultanan Ternate dan banyak melakukan campur tangan dalam urusan pemilihan sultan.

Janji setia calon sultan Ternate ke Belanda terlihat ketika Sultan Tadjul Mahful Bijanatillah Lhanan Sirajul Mulki Amirudin Iskandar Munawarusadik Wahoewa Manaladdin Syah Putra Anhar (1859-1876) dilantik sebagai Sultan Ternate ke-44. Seperti dikisahkan Tobias sebagai berikut:

“Saya akan tetap tunduk dan setia kepada Ratu Belanda dan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai wakil ratu di wilayah ini dan

Kerajaan Ternate akan saya titipkan dan demikian saya menerima dengan segala khidmat, kerajinan, dan penuh perhatian untuk memenuhi perintah yang dikeluarkan dari pemerintah Hindia Belanda mengenai persoalan yang tidak muncul dalam kesepakatan ini, agar disesuaikan dengan tuntutan masa sekarang dan selanjutnya, saya akan berusaha keras agar tetap bertindak sebagai raja atau sultan dan penguasa yang diangkat secara penuh hormat dan kepercayaan. Pernyataan ini saya buat dengan sumpah, diberi cap dan tandatangan di depan Residen Ternate Owen Mauirts de Munninck, dan disaksikan oleh bangsawan Bunga (*jogugu*/perdana menteri), Abdul Aji (*soseba*/sekertaris), Mahdum (*kadh*/imam kesultanan), dan Muhadim (*hokum soa-sio*/menteri dalam negeri).

Meski sultan menjadi hak turun-temurun bagi keluarga bangsawan, tetapi penunjukan seorang sultan bukan lagi menjadi hak mutlak para anggota dewan kerajaan yang berasal dari *bobato nyagimoi setufkange* (dewan delapan belas) dan *Gam Raha*, melainkan kewenangan Belanda. Dengan demikian, para elite kehilangan pengaruh dan kontrol atas institusi politik dan birokrasi di daerah-daerah kekuasaannya. Sejak saat itu, pemerintah Hindia Belanda memegang kontrol penuh terhadap kekuasaan para elite Kesultanan Ternate sekaligus mengganti sistem birokrasi tradisional yang bersandar pada garis keturunan ke birokrasi modern. Hal ini menyebabkan merosotnya peran dan fungsi beberapa pejabat kerajaan *Bobato Madopolo* (Dewan Menteri) seperti *Jogugu* (Perdana Menteri), *Kapita Lao* (Menteri Pertahanan dan Keamanan) dan

*Hukum Sangaji* (Hakim Agung) dalam hubungan kewenangannya dalam Kesultanan Ternate.

Sebelum kedatangan bangsa Belanda, keberadaan *Jogugu* mengatur segala sesuatu dan mempunyai wewenang yang sangat luas. Ia seperti wali sang raja dan lebih ditakuti serta ditaati daripada raja sendiri. Karena itu, menurut Clercq, jabatan ini mereka sebut *Kolano Magugu* yang berarti orang yang memegang raja dan kerajaan di tangannya. Akan tetapi, memasuki abad 18 ketika Kesultanan Ternate tunduk pada kekuasaan politik pemerintah kolonial Belanda akibat konsesi-konsesi politik yang diberikan sultan kepada Belanda. *Jogugu* tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar dan sering disaingi oleh *Kapita Lao*.

Menguatnya *Kapita Lao* dan surutnya kekuasaan *Jogugu* sangat erat kaitannya dengan politik Belanda yang lebih senang mendukung sultan secara langsung daripada pembantunya, *Jogugu*. Menurut Shaleh Putuhena, Belanda sering berkerja-sama dengan Ternate dalam bidang militer dengan membantu memimpin ekspedisi militer melakukan penebangan pohon cengkeh (*honggi tochten*) pada tahun 1728-1790. Ekspedisi tersebut dipimpin langsung *Kapita Lao*. Sebagai panglima perang, *Kapita Lao* bertugas memimpin pasukan untuk menaklukan daerah lain atau memadamkan pemberontakan dalam negeri. Hal ini sebagaimana dilakukan *Kapita Lao* Ali yang berjaya pada masa Sultan Hamzah (1627-1648) dan Sultan Mandarsyah (1648-1675).

Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, *Kapita Lao* harus dijabat oleh anggota keluarga sultan. Hal itu disebabkan *Kapita Lao* bertugas menjaga keselamatan sultan dan juga mendapat kesempatan untuk menjadi

sultan. Namun dalam perkembangannya, memasuki abad 19 sebagaimana dilaporkan Residen Bossher— peranan *Jogugu* dan *Kapita Lao* makin berkurang. Para pejabat tersebut hanya sekedar pelaksana dari kehendak sultan. Seiring berakhirnya kebijakan *extirpatie* dan *honggi tochten* oleh pemerintah Belanda, maka fungsi *Kapita Lao* tidak lagi memimpin perjalanan perang dan tugasnya lebih sering diserahkan ke pejabat lain.

Hal yang sama juga dialami pejabat *Hukum Sangaji*. Jika pada masa permulaan, pejabat ini hanya tinggal di istana sebagai petugas administrasi dan hakim serta menerima para pengunjung serta melakukan perjanjian-perjanjian, maka pada periode itu peranan digantikan oleh sekertaris. Hal ini dapat dimengerti karena mekanisme pemerintahan makin birokratis dan makin penting hubungan tertulis dengan Belanda. Jika pada abad sebelumnya, peran utama dalam kesultanan dipegang *Hukum Sangaji* sebagai petugas administrasi dan hakim, maka pada abad ini peranan utama dalam jalur politik ditangani oleh sekertaris. Munculnya jabatan sekertaris pada abad 19 sangat berhubungan dengan perannya sebagai administrator atau juru tulis antara sultan dengan Belanda. Hal ini dibuktikan pada masa pemerintahan Muhammad Arsad (1859-1862) sebanyak 48 perjanjian dan surat antara sultan dan pemerintah Belanda dalam tulisan Jawi dan bahasa Melayu. Dengan demikian begitu pentingnya peran sekertaris pada periode tersebut.

#### ***Reaksi Terhadap Keberpihakan Sultan***

Dengan membiarkan pemerintah kolonial Belanda mencampuri urusan-urusan politik dan pemerintahan serta mendapatkan hak untuk melantik dan memberhentikan sultan, berakibat

timbulnya perubahan sikap rakyat terhadap sultan. Sultan di mata rakyat tidak lagi dianggap sebagai pengayom dan kesultanan bukan lagi dianggap sebagai benteng pelindung rakyat. Hal ini memperlebar jarak politik antara masyarakat dengan penyelenggara negara ataupun wakilnya di keraton, sehingga menimbulkan krisis legitimasi. Rakyat di daerah-daerah menjadi resah dan hendak melepaskan diri dari kekuasaan sultan.

Situasi tersebut memicu timbulnya pemberontakan di beberapa daerah pada abad 19 sampai awal abad 20. Halmahera Utara mulai membangkang pada tahun 1840. Pulau Makian sesudah tahun 1846 berusaha melepaskan diri dari sultan Ternate dan lebih suka berada langsung di bawah kekuasaan Belanda. Pemberontakan lalu menjadi lebih mudah terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pusat kontrol kekuasaan Ternate. Sebutlah misalnya pemberontakan di Banggai dan Tobungku tahun 1841-1842. Menyusul pemberontakan Danu Baba Hasan di Halmahera tahun 1876. Pemberontakan Banau di Halmahera Barat (Jailolo) tahun 1914. Pemberontakan-pemberontakan tersebut, sebagaimana dikemukakan Adnan Amal, timbul disebabkan para bangsawan dianggap tidak berfungsi dalam kehidupan politik, sehingga daerah-daerah dengan mudah melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Ternate.

Sementara krisis legitimasi kekuasaan tersebut terjadi akibat campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam banyak hal dengan melangkahi norma-norma politik Kesultanan Ternate yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Sebagai contoh, meredupnya kekuasaan *bobato* sebagai pejabat yang bertugas mengangkat sultan karena dikalahkan oleh kekuasaan Belanda untuk mengangkat figur yang dipandang bisa diajak kerja-

sama. Landasan legitimasi kekuasaan tradisional dengan sendirinya mengalami erosi. Berbagai fungsi yang melekat dalam berbagai jabatan atau struktur kenegaraan mengalami pengkerdilan. Kedudukan *Fala Hara* (Hakim Agung), *Sabua Raha* (MPR) dan *bobato nyagimoi se tufkange* (DPR) dipersempit ruang lingkup jangkauan kekuasaannya dan "dipenjara" ke dalam lembaga baru yang disebut Komisi Empat yang diberi label lokal *Komisi Naruha*.

Meski kekuasaan pemerintah Belanda makin kokoh terhadap Kesultanan Ternate, namun Belanda masih tetap mengakui dan menghormati hak-hak sultan atas daerahnya, yang pada abad 19 meliputi Pulau Ternate, Pulau Halmahera, Pulau Sula, Kepulauan Banggai, dan Tobungku di pantai Timur Sulawesi Tengah. Pada periode yang sama, pemerintah Hindia Belanda melakukan perubahan struktur pemerintahan Maluku (reformasi birokrasi). Jika sebelumnya, Maluku terdiri dari Karesidenan Ambon, Banda, Ternate, dan Manado di bawah gubernur yang berkedudukan di Ambon, maka status pemerintahan kepulauan Maluku (*Gouvernement der Moluksche Eilanden*) dihapus. Selanjutnya, menetapkan Ternate, Ambon, Banda, dan Manado sebagai karesidenan mandiri atau otonom dan berada di bawah Gubernur Jenderal, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal No. 2 tanggal 6 Desember 1866 (S.1866 No.139). Sebagai karesidenan mandiri, wilayah Karesidenan Ternate meliputi seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan.

Namun dalam perkembangannya, wilayah Karesidenan Ternate, yang mencakup wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan kemudian

dibatasi. Keputusan Gubernur Jenderal, No. 19, tertanggal 15 Pebruari 1898 menetapkan bahwa wilayah Karesidenan Ternate hanya meliputi seluruh wilayah Kesultanan Ternate yang dibagi ke dalam delapan daerah (*afdeling*) dan masing-masing *afdeling* dibantu oleh asisten residen yaitu.

1. *Afdeling* Ternate di bawah pemerintahan langsung residen.
2. *Afdeling* Bacan di bawah seorang kontrolir yang berkedudukan dilabuha.
3. *Afdeling* Halmahera bagian utara yang berpusat di Galela, dibantu oleh seorang *bestuur assisten*.
4. *Afdeling* Halmahera bagian Timur dan Selatan dipimpin seorang *posthouder* yang berkedudukan di Patani.
5. *Afdeling* Kepulauan Sula dipimpin seorang *posthouder* yang berkedudukan di Sanana.
6. *Afdeling* Banggai dipimpin seorang *posthouder* yang berkedudukan di Kintang, pantai Timur Sulawesi.
7. *Afdeling* Papua bagian Utara dipimpin seorang *kontolir* di Manokowari.
8. *Afdeling* Papua bagian Barat dan Selatan dipimpin seorang *kontolir* yang berpusat di Kepulauan Raja Ampat.

Pemisahan ini didasarkan atas pertimbangan efisiensi pelaksanaan administrasi pemerintahan. Sekaligus juga berarti mengukuhkan kekuasaan penjajah Belanda.

## KESIMPULAN

Rangkaian perubahan di atas bukannya terjadi tanpa perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1914, Sultan Usman Syah (1896-1930) berupaya mengembalikan

kekuasaan Ternate dengan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sultan mempolitisir rakyat di wilayah kekuasaannya di Halmahera Barat (Jailolo) untuk memberontak. Sultan Usman Syah akhirnya ditangkap bersama putranya Pangeran Muhammad, yang saat itu menjadi *Kapita Lao* dan diasingkan ke Bandung tahun 1915.

Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 23 September 1915 No. 47, Sultan Usman Syah dicopot dari kedudukannya sebagai Sultan Ternate. Pada saat yang sama, *jogugu* atas nama Kesultanan Ternate menandatangani perjanjian pendek yang mengakhiri kedaulatan Kesultanan Ternate atas kerajaannya. Sejak periode tahun 1915-1929, tahta Kesultanan Ternate mengalami kekosongan pemerintahan. Seluruh kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan diatur dan ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijalankan oleh *Bobato Madopolo* (dewan meteri) dan *Bobato Nyagomoi se Tufkange* (lembaga legislatif).

Kesultanan Ternate terus mengalami kemerosotan. Posisi sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate sejak tahun 1866 hingga merosot kedudukannya menjadi sebuah *afdeling* pada tahun 1921. Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan tertanggal 16 April 1921, yang menetapkan perubahan status dari karesidenan menjadi *afdeling*.

Perubahan status ini tidak lepas dari upaya pemerintah Hindia Belanda menguasai Ternate dan mengintegrasikan seluruh Kawasan Timur Indonesia ke dalam Propinsi Timur Besar (*Grote Oost*) di bawah seorang gubernur yang berkedudukan di Makassar. Sejak saat itu, pelaksanaan pemerintahan dijalankan langsung oleh Belanda dan bukan di

bawah kendali para *Bobato Madopolo* (dewan menteri), hingga dilantiknya sultan ke-47, Sultan Iskandar Djabir Syah, tanggal 2 September 1929.

Sejak Iskandar Djabir Syah dilantik sebagai sultan, pada 1930, Pemerintah Belanda mengeluarkan *Zelf Bestuur Regeling*, yang menetapkan Pembagian Maluku Utara kedalam tiga swapraja, yaitu; Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan. Tiap-tiap kesultanan dibagi dibagi kedalam distrik-distrik, yang dikepalai oleh kepala distrik, dan membawahi onder-distrik. Kepala distrik diangkat dan diberhentikan oleh masing-masing sultan di wilayahnya.

Dengan demikian terdapat dua bentuk pemerintahan yakni, pemerintahan langsung Belanda dan pemerintahan tidak langsung dibawah para sultan dan pembantunnya. Bentuk pemerintahan tersebut berlangsung hingga masuknya tentara pendudukan Jepang. Ketika Jepang memasuki kawasan Maluku Utara tahun 1942, dengan alasan politik Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah memilih bekerjasama dengan Sekutu (Belanda) ketimbang memihak Jepang.

### Daftar Pustaka

- A.B. Lopian. (1980). *Memoie van Overgave*, J.H. Tobias (1857), dan *Memorie van Overgave*. C. Bosscher Residen Ternate (1859), Jakarta: ANRI.
- Adnan Amal (2007). *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, Makassar: Nala Cipta Litera
- Andaya, Leonard Y. (1973). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii, Press.
- Anne Booth et al., (ed.), (1988). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Clercq, F.S.A. (1820). *Bijdragen tot de Kennnis der Residentie Temate*. Leiden: Brill.
- Crafton, R. H. (1946). *A Peagent of Spice Island*, London: John Bale dan Sons.
- DJoko Suryo, et. al. (2001). *Agama dan Perubahan Sosial Studi Tentang Hubungan Antar Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik*, Yogyakarta: UGM LKPSM.
- Edward L. Poelinggomang. (1991). *Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makasar Pada Abad ke-19*. Amsterdam: Academisch Proefschrift de Vrije Universiteit te Amsterdam.
- Hanna, W. A. 1978). *Kepulauan Banda Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Juwono, Harto dan Hutagalung, Yosephine. (2005). *Sejarah Kerajaan Gorontalo*. Yogyakarta: Ombak.
- Kartodirjo, Sartono. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: dari Emporium Sampai ke Imperium, jilid I*. Jakarta; Gramedia.
- L. E. Visser, (ed). (1994). *Halmahera and Beyond, Social Science Research in The Moluccas*. Leiden: KITLV Press.
- Leirissa, R.Z. (1999). *Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Leirissa, R.Z. (1996). *Halmahera Timur dan Raja Jailolo Pergolakan di Laut Seram Abad Ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Memori van Overgave* Karesidenan

- Maluku, Residen B.J. Haga, 1930.  
Mvo seri II E. Jakarta: ANRI.
- Memori van Overgave* Gubernur Maluku  
R.J. Koppenol April 1934. Koleksi  
Mvo Seri 2, Nomor 26 Arsip  
Nasional RI Jakarta.
- Pujiastuti, Titik. (1995). *Naskah-naskah  
Kuno Maluku Utara Koleksi  
Perpustakaan Nasional* dalam Ade  
Kamaluddin, ed., *Ternate Bandar  
Jalur Sutra*. Ternate: Lintas.
- Putuhena, A. M. Shaleh. (1994). *Struktur  
Pemerintahan Kesultanan Ternate  
dan Agama Islam*, dalam E.K.M  
Masinambow (Ed.), *Halamahera  
dan Raja Ampat sebagai Kesatuan  
Majemuk: Studi Studi Terhadap  
Suatu Daerah Transisi*. Jakarta:  
Lembaga Ekonomi dan  
Kemasyarakatan Nasional LIPI.
- Widjojo, Muridan S. (2007). *Cross Cultur  
Aliance Making and Lokal  
Risistence in Maluku During the  
Revolt of Prince Nuku 1780- 1810*.  
*Disertasi*, Universiteit Leiden.